

FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI PAPUA

Oleh:

Esra Erikson Sihombing,SE¹
Anthonius H Citra Wijaya,M.Sc,Ak,CA²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena *flypaper effect* dengan cara menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel 26 kabupaten/kota dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua untuk periode tahun 2010-2013. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu Laporan Realisasi Belanja yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua. Metode statistik yang digunakan adalah statistik inferensial dengan analisis regresi sederhana dan berganda menggunakan perangkat SPSS (*Statistic Product and Service Solution*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi *flypaper effect*, sesuai dengan syarat bahwa nilai koefisien Dana Alokasi Umum lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Provinsi Papua, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah, Flypaper Effect

1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah digantikan oleh UU No. 32 tahun 2004, kemudian digantikan lagi oleh UU No. 12 tahun 2008.

Dalam UU No. 12 tahun 2008 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah.

Menurut Koswara (2000) dalam Yulianto (2001), daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli

¹ Alumni Jurusan Akuntansi FEB Uncen

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke pemerintah daerah. Dalam praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah, 2006).

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah dicirikan oleh adanya penerapan sistem desentralisasi, salah satunya adalah desentralisasi keuangan. Ada pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk mengelola pendapatan daerah yang ber sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan beserta lain-lain PAD yang sah.

UU No. 21 Tahun 2001 mengamanatkan pemberian dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Papua. Tujuan pemberian dana Otonomi khusus tersebut adalah untuk menyejahterakan dan memajukan rakyat Papua. Secara khusus, dana Otonomi khusus diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan dan kesehatan rakyat Papua. Sepanjang 2002-2010 Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana Otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat senilai total Rp28,84 triliun.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dijelaskan bahwa penetapan kriteria untuk menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40 persen untuk variabel jumlah penduduk, 35 persen untuk variabel luas wilayah dan 25 persen untuk variabel jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Fakta di atas memperlihatkan bahwa perilaku fiskal pemerintah daerah dalam merespon transfer dari pusat menjadi determinan penting dalam menunjang efektivitas kebijakan transfer. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). *Flypaper Effect* merupakan fenomena dalam penelitian ini. Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Apakah DAU berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua?; (2) Apakah PAD berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua?; dan (3) Apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua?

2. KAJIAN PUSTAKA & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dan APBD di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

2.2 Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. *Unconditional grants* yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (*lump sum*) dari pemerintah pusat (Maimunah, 2006).

Menurut teori Peacock dan wiseman dalam Purbayu dan Retno (2005) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman tersebut menjelaskan bahwa secara ideal hal tersebut menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya Pendapatan Domestik Bruto setiap masyarakat menyebabkan Pendapatan Asli Daerah semakin besar sehingga secara sepadan akan menyebabkan pengeluaran Pemerintah Daerah menjadi semakin besar pula. Hal tersebut ternyata tidak selalu ideal dan seolah menyimpang dari konteks rill.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Sutrisno, 1984).

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18, Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya.

2.4 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi umum relatif besar. Dengan

maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Halim (2009) mengatakan bahwa ketimpangan ekonomi anantara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

2.5 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Belanja pemerintah daerah dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi. Belanja operasi merupakan jenis belanja yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik
- b. Belanja Modal. Jenis belanja ini merupakan belanja yang manfaatnya dapat diperoleh lebih dari satu tahun dan dilakukan untuk menambah aset atau kekayaan daerah, yang mana dari aset atau kekayaan tersebut akan menimbulkan belanja lainnya.

Belanja tak terduga. Yaitu belanja tidak terduga adalah belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai fenomena *flypaper effect* yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yaitu:

- a. Halim (2004) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah.
- b. Prakosa (2004) menyatakan bahwa secara empiris membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Penelitian ini dilakukan di DIY dan Jawa Tengah.
- c. Maimunah (2006) menyatakan bahwa Flypaper Effect disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD.
- d. Junaedi (2011) penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa terjadi flypaper effect pada pemanfaatan DAU. Selain itu, hasil penelitian juga membuktikan terjadinya asimetri dalam penggantian fiskal, ketika DAU meningkat pemerintah daerah membelanjakan tambahan pendapatan. Namun ketika jumlah DAU berkurang belanja daerah tidak berkurang dan pemerintah daerah mengkompensasi pengeluaran tersebut melalui tambahan pungutan pajak.
- e. Kusumadewi dan Rahman (2005) menyimpulkan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah dan variabel DAU pada masing-masing kondisi daerah memiliki pengaruh lebih kuat terhadap Belanja Daerah daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Ini mengindikasikan bahwa flypaper effect tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi.
- f. Sari (2009) menyatakan bahwa Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

2.7 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002). Holtz-Eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pusat dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrensi dan Milas (2001), menggunakan sampel *municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric.

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrensi & milas, 2001; Von Furstenberg et al, 1986). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan memengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis* (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Von Furstenberg et al, 1998). Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Hipotesis untuk menguji pengaruh PAD terhadap BD Pemda Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

c. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Holtz-Eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Sukriy & Halim (2004) bahwa DAU terhadap Belanja Daerah adalah lebih kuat pada regresi dengan *lag* PAD terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, maka hipotesis untuk menguji hubungan PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah periode berikutnya adalah:

H3: Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

3. METODOLOGI RISET

Populasi penelitian ini adalah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, dengan data PAD, DAU, Belanja Daerah (belanja bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum), dan Total Belanja. Alasan pemilihan sampel tersebut adalah: (1) Cukup representatif dengan karakteristik ekonomi dan geografis, (2) ketersediaan data. Sementara data yang dianalisis adalah data sekunder yang bersumber dari laporan APBD Pemda kabupaten/kota Papua, yakni data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Data Belanja Daerah yang terinci dalam Belanja bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pekerjaan Umum diperoleh melalui permintaan tertulis ke pejabat Pemerintah Provinsi Papua.

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*) dan alat analisis memakai SPSS 20. Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Regersi sederhana dan berganda yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis dijabarkan di bawah

ini dalam bentuk persamaan-persamaan. Berikut persamaan-persamaan yang digunakan dalam pengujian hipotesis 1, 2, dan 3:

$$Y = a + X1 + e \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = a + X2 + e \dots \dots \dots (2)$$

$$Y = a + X1 + X2 + e \dots \dots \dots (3)$$

dimana:

Y = Belanja Daerah,

a = konstanta,

X1 = Pendapatan Asli Daerah,

X2 = Dana Alokasi Umum,

e = error term.

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam penelitian ini diteliti hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikategorikan sebagai variabel independen, terhadap kinerja Belanja Daerah (BD) yang dikategorikan sebagai variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (X1) terhadap Belanja Daerah (Y)

Berdasarkan hasil olah data mengindikasikan semakin tinggi dana alokasi umum, belanja daerah akan semakin meningkat. Artinya setiap kenaikan dana alokasi umum sebesar satu satuan, akan meningkatkan belanja daerah. Hasil ini diperkuat dengan hasil hipotesis (dengan uji t) dimana dari hasil uji hipotesis mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh antara dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah” dapat diterima.

Gambar 1
Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.621 ^a	.385	.379	14,80898	2.010

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	393.424	68.904		5.710	.000
	DAU	.424	.155	.262	2.737	.007

$$Y: 6.030 + 0,424 X2 + e$$

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Bambang (2004) di mana besarnya belanja daerah dipengaruhi jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Halim (2003) mengemukakan dana perimbangan dari pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap Belanja Daerah (Y)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap Belanja Daerah (Y) menunjukkan adanya pengaruh positif pendapatan asli daerah (X2) terhadap belanja daerah (Y). Kondisi tersebut mengindikasikan semakin tinggi pendapatan asli daerah, belanja daerah akan semakin meningkat. Artinya setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar satu satuan, akan meningkatkan belanja daerah. Hasil ini diperkuat dengan hasil hipotesis (dengan uji t) dimana dari hasil uji hipotesis mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5$ persen), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya hipotesis yang menyatakan

“ada pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Papua dapat diterima dan ini konsisten dengan hasil penelitian dan Halim (2003) dan Mutmainah (2006).

Gambar 2
Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.336 ^a	.113	.104	.25639	1.643

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.954	.514		19.381	.000
	PAD	.185	.051	.336	3.607	.000

$$Y: 9.954 + 0,185 X_1 + e$$

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Bambang (2004) dimana pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Dengan adanya otonomi daerah memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerahnya sendiri secara mandiri. Dari sumber PAD merupakan pendapatan penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Selama ini PAD Provinsi Papua terbesar hanya pada hasil tambang, pajak kendaraan, dan minuman keras. Bila ketuga hasil ini ditiadakan maka PAD Papua tentu sangatlah minim Untuk itu Pemerintah harus berpikir lebih keras untuk mencari sumber-sumber lain yang bisa dijadikan PAD, misalnya yang berasal dari sumber daya alamnya.

4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap Belanja Daerah (Y)

Hasil analisis menggunakan regresi dapat disimpulkan pendapatan asli daerah (X1) dan dana alokasi umum (X2) secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah, akan meningkatkan belanja daerah. Hasil ini juga diperkuat dari uji hipotesis, di mana nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah dapat diterima.

Gambar 3
Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.541 ^a	.293	.278	197,57154	1.805

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	304.472	78.304		3.888	.000
	PAD	.141	.054	.227	2.628	.010
	DAU	.719	.173	.360	4.155	.000

$$Y: 304,472 + 0,141 X_1 + 0,71 X_2 + e$$

Pengujian atas pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap belanja daerah dan mana yang lebih dominan. Sebagaimana telah dibahas diawal bahwa transfer atau *grants*

atau DAU dan pendapatan asli daerah secara terpisah berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil yang diperoleh bisa menunjukkan kemungkinan terjadi atau tidaknya *flypaper effect*. Untuk dapat dikatakan telah terjadi *flypaper effect* maka hasil yang diperoleh haruslah menunjukkan bahwa nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa signifikansi pengaruh DAU terhadap BD (secara statistik) lebih kuat daripada pengaruh PAD, atau terjadi *flypaper effect*. Dengan demikian hasil penelitian ini menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap BD diterima. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim (2003).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua,
- b. PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua,
- c. DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah

- a. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada Kabupaten/Kota, yaitu 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian.
- b. Penulis hanya menggunakan dua variabel independen sehingga hasil penelitian ini masih sangat sederhana.

5.3 Saran

- a. Untuk penelitian berikutnya agar memasukkan aspek perilaku Pemda dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah, serta memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- b. Temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberian DAU kepada daerah kabupaten dan kota di Indonesia bukan hanya untuk menutup celah fiskal yang ada pada kemampuan keuangan daerah, namun juga sebagai sumber penerimaan utama untuk membiayai belanja. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah ke depannya, agar lebih mampu meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi dan menggali potensi daerah di luar pajak daerah, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani oleh pajak, dan PAD yang dihasilkan mampu membiayai belanja daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Jawa dan Bali*. Jakarta
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota di Pulau Sumatra*, *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang
- Indhi Hastuti, 2011, *Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*

- Junaidi, *Asimetri pada Flypaper Effect: Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah di Indonesia*
- Masdjojo 2006. Gregorius N. dan Sukartono, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah*
- Prakosa 2004, *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah. Provinsi Jawa Tengah dan DIY.*
- Darwanto 2007, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja.*
- Abdullah 2008, *Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah : Studi Empiris atas Determinan dan Konsekuensinya terhadap Belanja Pemeliharaan.*
- Pangesti 2008, *Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD : Studi Kasus Penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Kabupaten Batang.*
- Sari 2009, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah. Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.*
- Zampelli, Ernest M. 1986. *resource fungibility, the flypaper effect, and the Expenditure impact of grants-in-aid. The Review of economics and Statistics 67: 33-40*
- Bradford, D. & W. Oates. 1971. *The analysis of revenue sharing in a new Approach to collective fiscal decisions. Quarterly Journal of Economics 83 (3)*
- Gamkhar, Shama & Wallace Oates. 1996. *Asymetries in response to increase And decrease in intergovernmental grants: Some empirical findings. National Tax Journal 49 (4):501-512*
- Sukriy, Abdullah., & Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi STEI No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109*